
PENGEMBANGAN DESA DIGITAL DI DESA KALIKOA KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON

Rakhmat Hardiyansyah^a, Muhamad Amin^b

^a Ilmu Administrasi Pemerintahan Daerah Politeknik Bina Persada, Cirebon, Indonesia

^b Ilmu Administrasi Sekolah Tinggi Administrasi Mandala, Indonesia

E-mail: rakhmat.hardi@gmail.com

ABSTRAK

Era desentralisasi dan otonomi memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan di berbagai sektor, termasuk di tingkat pemerintahan desa. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan mengembangkan layanan berbasis digital. Salah satu contoh keberhasilan implementasi konsep desa digital adalah Desa Kalikoa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan desa digital di Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Kajian penelitian ini menggunakan teori elemen sukses pengembangan *e-government* dari Harvard JFK School of Government, yang mencakup tiga aspek utama: *support*, *capacity*, dan *value*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Pemerintah Desa Kalikoa dalam mengembangkan desa digital dipengaruhi oleh dukungan pemerintah serta kapasitas pengelolaan sumber daya yang memadai. Pengembangan desa digital ini memberikan manfaat tidak hanya bagi pemerintah desa, tetapi juga bagi masyarakat. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa keterbatasan infrastruktur pendukung serta anggaran yang masih minim.

Kata Kunci: *Desa Digital, Pelayanan Publik, E-Government*

ABSTRACT

The era of decentralization and autonomy provides great opportunities for local governments to carry out development and development in various sectors, including at the village government level. Along with the rapid development of technology, the government is required to adapt by developing digital-based services. One example of the successful implementation of the digital village concept is Kalikoa Village. This study aims to analyze the development of a digital village in Kalikoa Village, Kedawung District, Cirebon Regency. This research study uses the theory of successful elements of e-government development from the Harvard JFK School of Government, which includes three main aspects: support, capacity, and value. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. The results showed that the success of the Kalikoa Village Government in developing a digital village was influenced by government support and adequate resource management capacity. The development of this digital village provides benefits not only for the village government, but also for the community. However, this study also found obstacles in the form of limited supporting infrastructure and a minimal budget.

Keywords: *Digital Village, Public Service, E-Government*

* Corresponding Author.

E-mail: rakhmat.hardi@gmail.com

PENDAHULUAN

Desa memiliki kewenangannya sendiri dalam dalam rangka mengelola dan mengatur kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 disebutkan kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa adalah subsistem pemerintahan daerah di bawah subsistem pemerintahan nasional. Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadatnya (Rohiani, 2021). Desa dapat melakukan pembangunan demi kepentingan masyarakatnya dengan mengacu pada prinsip kemandirian, partisipasi, dan keberlanjutan.

Perencanaan pembangunan merupakan tugas utama atau kegiatan bersamayang membutuhkan banyak tenaga baik secara langsung maupun tidak langsung dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan dibutuhkan dalam memenuhi keperluan pembangunan yang lebih besar dari sumber daya yang ada, agar proses pembangunan nasional dapat meraih tujuan pembangunan secara maksimal seperti yang telah direncanakan dan ditentukan sebelumnya. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan arah pembangunan yang terbatas dalam memperoleh tujuan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, dan efisien (Samaun, et al., 2022) Pembangunan yang dapat dilakukan oleh desa salah satunya pembangunan dalam bidang pengembangan teknologi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 82 mengatur tentang pengelolaan sistem informasi desa yang dapat digunakan untuk mendukung tata kelola pemerintahan, pembangunan desa, serta pelayanan publik berbasis teknologi.

Perkembangan era digital menuntut pemerintahan desa untuk segera mengadopsi

teknologi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Digitalisasi desa bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan desa telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 86 mengamanatkan bahwa desa berhak mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) guna mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis digital. Implementasi SID telah terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa, sebagaimana ditunjukkan dalam studi oleh (Mardinata, et al, 2023) yang mengamati peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi digital.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendorong desa untuk menerapkan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Pemerintah Desa dapat menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang Desa Digital untuk mengatur kebijakan dan strategi pengembangan teknologi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Peraturan Desa (Perdes) ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program digitalisasi desa, termasuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peningkatan literasi digital, dan pengelolaan layanan publik berbasis digital. Menekankan pentingnya regulasi lokal dalam mendukung transformasi digital desa, dengan menyoroti bahwa digitalisasi desa adalah program strategis nasional yang penting untuk mempercepat pelayanan publik dan mewujudkan good governance (Babys, et al., 2024).

Konsep desa digital diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Namun, bagi sebuah desa dalam pengembangan desa digital banyak ditemukan hambatan dan tantangan, seperti jangkauan

layanan internet yang masih minim, partisipasi dan kualitas sumber manusia yang terbatas, hingga masih belum adanya permodalan yang optimal. Dengan demikian, sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat mewujudkan desa digital (Sartik & Pusung, 2024).

Konsep desa digital diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), terutama di wilayah pedesaan yang selama ini tertinggal dalam akses dan pemanfaatan TIK. Namun, dalam implementasinya di tingkat desa, seperti yang terjadi di Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, masih ditemukan berbagai hambatan dan tantangan yang signifikan. Hambatan tersebut meliputi jangkauan layanan internet yang belum merata, minimnya literasi digital masyarakat, rendahnya partisipasi warga terhadap inovasi digital, serta keterbatasan permodalan dan dukungan teknis dari pemerintah daerah. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa dari sekitar 6.100 penduduk Desa Kalikoa (BPS Cirebon, 2023), kurang dari 18% masyarakat yang secara aktif mengakses layanan digital yang disediakan melalui website desa, meskipun layanan tersebut telah tersedia sejak 2022.

Data tersebut diperkuat oleh hasil wawancara awal dengan perangkat desa, yang menyebutkan bahwa rata-rata kunjungan ke website desa hanya mencapai 40–60 kali per bulan, dengan dominasi pengguna dari kalangan muda dan perangkat desa sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa adopsi teknologi digital di tingkat warga masih rendah, dan pengembangan desa digital belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Tantangan ini bersifat struktural dan berkelanjutan, bukan hanya bersifat sementara, karena berkaitan dengan faktor SDM, infrastruktur, dan desain kebijakan publik yang belum sepenuhnya adaptif terhadap konteks lokal.

Sejalan dengan konsep desa digital, Pemerintah Desa Kalikoa sebenarnya telah memanfaatkan teknologi informasi berupa website desa dan media sosial resmi sebagai sarana pelayanan publik, promosi potensi desa, dan diseminasi informasi kepada masyarakat. Fokus utama pengembangan desa

digital difokuskan pada fitur layanan mandiri, seperti pembuatan surat pengantar, verifikasi penerima bantuan sosial, dan pengaduan masyarakat. Namun, tingkat pemanfaatan yang rendah memunculkan pertanyaan kritis: apakah sistem yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan preferensi warga. Dalam konteks teori sukses pengembangan *e-governemnt*, keberhasilan *e-government* ditentukan oleh manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna akhir, bukan hanya keberadaan infrastruktur digital itu sendiri (Sudirman & Saidin, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis dan mendalam bagaimana pengembangan desa digital di Desa Kalikoa dijalankan, sejauh mana teknologi digital memberi dampak terhadap pelayanan publik, serta mengapa tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Penelitian ini juga akan memetakan faktor-faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi keberhasilan inisiatif digital desa, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk optimalisasi implementasi desa digital ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan dan menggambarkan secara rinci fenomena pengembangan desa digital di Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami proses implementasi *e-government* di tingkat desa, serta menilai aspek dukungan (*support*), kapasitas (*capacity*), dan nilai/manfaat (*value*) dari perspektif para aktor lokal dan masyarakat.

Teknik penentuan informan menggunakan metode purposive sampling untuk memilih informan utama yang memiliki pemahaman mendalam terkait program desa digital, yaitu Kepala Desa Kalikoa sebagai key informan. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kepala desa memiliki otoritas dan pengetahuan luas mengenai kebijakan dan implementasi program yang diteliti. Namun, mengingat keterbatasan informasi dari satu sumber, teknik snowball

sampling digunakan untuk menjaring informan tambahan secara bertahap dari jaringan sosial informan utama.

Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis data dengan fokus pada aspek *support*, *capacity*, dan *value* dalam pengembangan *e-government* di Desa Kalikoa (Creswell & David Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa digital sebagai proyek pengembangan layanan digital yang digagas oleh pemerintah untuk masyarakat umum dengan standar yang mengutamakan layanan berbasis internet dan aplikasi pada perangkat lunak (Agastha & Fikri, 2024). Kebersamaan dalam pembangunan desa idealnya berawal dari hubungan internal di dalam desa itu sendiri, di mana masyarakat, perangkat desa, serta kelompok-kelompok sosial saling berkolaborasi secara horizontal. *E-government* merupakan konsep pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, pelaku bisnis, dan berbagai pemangku kepentingan (Djabbari, et al., 2024). Dalam implementasinya, *e-government* memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan secara digital melalui internet, sehingga akses terhadap informasi dan layanan menjadi lebih mudah, cepat, serta transparan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong keterbukaan serta akuntabilitas dalam proses administrasi dan pengambilan kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut pengembangan desa digital di Desa Kalikoa dapat dianalisis menggunakan indikator elemen sukses pengembangan *E-government* yang terbagi menjadi tiga elemen yaitu *support*, *capacity* dan *value* (Indrajit, 2016). Penelitian ini membedah keberhasilan sekaligus tantangan yang dihadapi desa dalam transformasi digitalnya. Pendekatan ini

sejalan dengan literatur global mengenai tata kelola digital yang menekankan pentingnya sinergi antara aspek kebijakan, sumber daya, dan hasil layanan (Guillamón, et al., 2016).

A. *Support pengembangan e-government*

Support merupakan elemen penting dalam pengembangan *e-government* karena menjadi fondasi utama yang memastikan keberlanjutan dan efektivitas implementasi sistem digital dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam konteks desa digital di Desa Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. Elemen ini mencakup dukungan dari berbagai aspek, seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur teknologi, pendanaan, serta keterlibatan masyarakat dan sektor swasta. Perlunya dukungan kebijakan, implementasi *e-government* akan mengalami kendala regulasi, sehingga peraturan yang jelas dan komitmen dari pemerintah desa serta kabupaten menjadi faktor krusial dalam memastikan keberlanjutan program digitalisasi, seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, serta adanya sosialisasi.

Visi dan misi pemerintah dalam mempermudah pemberian layanan kepada masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pelayanan tersebut (Laili & Kriswibowo, 2022) dalam pengembangan desa digital di Desa Kalikoa, Pemerintah Desa memiliki visi dan misi untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan keterbukaan informasi. Melalui layanan digital seperti website desa, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara mandiri, memperoleh informasi desa, dan mengikuti perkembangan melalui media sosial resmi desa. Selain itu, sistem layanan mandiri untuk pembuatan surat memungkinkan warga mengurus administrasi tanpa harus datang dan mengantri di balai desa. Digitalisasi pelayanan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa, mendorong kemajuan, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Rencana pengembangan *e-government* memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat berjalan dengan sukses. Dalam prosesnya, keterlibatan berbagai pihak

sangat diperlukan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan. Semangat kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan desa digital di Desa Kalikoa, yang diwujudkan melalui kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan.

Elemen *support* merupakan pilar fundamental dalam pengembangan *e-government* karena menjadi prasyarat utama yang menentukan keberhasilan, keberlanjutan, dan efektivitas implementasi sistem digital dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks pengembangan desa digital di Desa Kalikoa, elemen *support* mencakup dukungan dari berbagai aspek, yaitu dukungan kebijakan, infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia (SDM), pendanaan, serta keterlibatan multipihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat.

1. Dukungan Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan yang jelas dan progresif menjadi kerangka hukum yang memberikan legitimasi terhadap transformasi digital di desa. Tanpa kerangka hukum yang mendukung, program digitalisasi desa berisiko stagnan atau tidak berkelanjutan. Dalam kasus Desa Kalikoa, pengembangan desa digital didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan pentingnya otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar hukum dalam menjamin akses informasi yang transparan kepada masyarakat. Kebijakan ini mendorong pemerintah desa untuk aktif menginformasikan segala bentuk layanan dan kegiatan secara terbuka melalui media digital seperti website desa dan media sosial resmi. Komitmen regulatif ini diperkuat oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa landasan hukum yang kuat meningkatkan kepercayaan publik dan mempercepat adopsi teknologi dalam pelayanan publik (Wagola, et al., 2023)

2. Infrastruktur Teknologi dan Pendanaan

Pengembangan desa digital tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Akses internet, perangkat keras dan lunak, serta sistem

informasi desa menjadi kebutuhan dasar. Di Desa Kalikoa, pembangunan jaringan internet desa dan penyediaan komputer di kantor desa serta pelatihan penggunaan aplikasi desa digital menjadi bagian dari dukungan yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur yang andal berkontribusi langsung terhadap kualitas pelayanan publik digital (Margariti, et al., 2022). Tanpa infrastruktur yang layak, platform *e-government* tidak akan optimal dalam menjangkau masyarakat desa yang geografisnya tersebar.

3. Dukungan SDM dan Kapasitas Teknologi

Transformasi digital membutuhkan SDM yang kompeten. Di Desa Kalikoa, pelatihan dan pendampingan teknis dari pemerintah daerah menjadi katalisator dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa. Pelatihan ini mencakup penggunaan sistem layanan mandiri, pengelolaan website, pengarsipan digital, hingga penggunaan media sosial untuk diseminasi informasi.

Pengembangan SDM melalui pelatihan menjadi inti dari upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas layanan organisasi (Hartini, 2023). Hal ini diperkuat oleh studi dari (Badan, et al., 2022) yang menekankan bahwa pelatihan rutin dan relevan meningkatkan efisiensi dan kompetensi organisasi publik secara signifikan.

4. Keterlibatan Masyarakat dan Sosialisasi Program

Partisipasi masyarakat menjadi elemen *support* yang tidak kalah penting. Desa Kalikoa telah melakukan sosialisasi program digital melalui media komunikasi digital dan peran Ketua RT/RW sebagai ujung tombak penyampaian informasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan *citizen-centric e-governemnt*, di mana masyarakat tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem digital desa.

Penelitian terbaru dari (Kempeneer, et al., 2023) menekankan bahwa keberhasilan *e-government* tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses

perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem digital.

Di Desa Kalikoa, peran Ketua RT/RW dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi mengenai layanan digital kepada masyarakat telah meningkatkan tingkat partisipasi warga, dengan 40% lebih banyak warga yang mengakses layanan administratif melalui platform digital dibandingkan sebelumnya. Keterlibatan masyarakat ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan kepercayaan terhadap program digitalisasi desa.

Elemen *support* dalam pengembangan *e-government* Desa Kalikoa menunjukkan integrasi antara kebijakan, infrastruktur, pelatihan SDM, dan keterlibatan masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat. Dukungan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan operasional. Dengan sinergi dari pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, digitalisasi desa memiliki potensi besar dalam mempercepat pelayanan publik yang efisien, transparan, dan partisipatif.

B. Capacity government

Kemampuan pemerintah desa memegang peranan krusial dalam keberhasilan pengembangan desa digital di Desa Kalikoa. Menurut (Indrajit, 2016) terdapat tiga sumber daya utama yang perlu dipenuhi untuk mendukung proses ini, yaitu: (1) sumber daya finansial, (2) infrastruktur teknologi informasi, dan (3) sumber daya manusia. Keberhasilan implementasi desa digital sangat bergantung pada kesiapan pemerintah desa dalam memenuhi ketiga aspek tersebut.

Dari ketiga sumber daya tersebut, faktor finansial menjadi kunci utama agar pengembangan desa digital dapat berjalan dengan optimal. Faktor finansial terbukti menjadi yang paling vital. Sumber pendanaan harus mencukupi agar program desa digital dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam konteks ini, alokasi anggaran dari APBDes untuk pemeliharaan website desa dan layanan internet menjadi langkah strategis untuk memastikan akses yang terus menerus kepada masyarakat (Purwanti, et al., 2024). Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai di Desa

Kalikoa, upaya maksimal dilakukan dengan memanfaatkan dana desa secara efektif. Anggaran yang berasal dari APBDes sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan pemeliharaan website desa serta pembiayaan layanan internet guna memastikan akses informasi digital yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Aspek infrastruktur dan teknologi informasi juga sangat penting. Tanpa infrastruktur yang memadai seperti akses internet yang stabil dan perangkat teknologi, upaya untuk mengimplementasikan desa digital akan menemui kendala. Di Desa Kalikoa, meskipun kemajuan sudah ada, seperti adanya fasilitas internet, kendala dalam stabilitas kecepatan internet dan kelengkapan data informasi di website desa masih menjadi tantangan yang harus diatasi (Rachmawati, et al., 2022). Dalam pengembangan desa digital, pemerintah desa juga perlu memastikan ketersediaan infrastruktur dan teknologi informasi yang memadai. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, implementasi desa digital tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Di Desa Kalikoa, infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama dalam mendukung desa digital meliputi akses internet serta perangkat komputer atau laptop.

Saat ini, infrastruktur yang tersedia di Desa Kalikoa sudah cukup mendukung pengembangan desa digital. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti kecepatan internet yang kurang stabil serta beberapa fitur pada website desa yang belum sepenuhnya terisi. Beberapa menu yang masih kosong meliputi informasi tentang produk desa, panduan layanan desa, peraturan desa, serta laporan desa. Hal ini menjadi tantangan yang perlu segera diatasi agar desa digital dapat berfungsi secara optimal.

Untuk mengoptimalkan pengembangan desa digital di Desa Kalikoa, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola layanan digital. Sumber daya manusia yang berkompeten adalah elemen krusial ketiga dalam pengembangan desa digital. Dengan hanya satu pegawai yang bertugas mengelola layanan digital, Desa Kalikoa dihadapkan pada kekurangan tenaga yang dapat mendukung optimalisasi

operasional layanan (Irwansyah, 2021). Penelitian menunjukkan perlunya pelatihan teknologi digital untuk aparatur desa agar mereka dapat memahami dan mengelola sistem yang bergantung pada teknologi informasi dengan lebih baik (Kusumawardani, et al., 2024). Pelatihan yang benar dan terarah dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sistem desa digital (Kareth, et al., 2021). Saat ini, pemerintah desa hanya memiliki satu orang pegawai yang bertugas sebagai operator layanan digital. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk mendukung operasional desa digital secara optimal.

Sebagai langkah untuk mengatasi keterbatasan ini, pemerintah desa berupaya memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia. Selain itu, pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pengarahan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat desa dalam mengelola sumber daya dan infrastruktur yang ada untuk pelayanan publik yang lebih baik (Rasaili, 2022). Pelatihan teknologi digital juga diberikan kepada aparatur desa agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan administrasi yang semakin bergantung pada teknologi informasi. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi desa digital yang bertujuan meningkatkan efisiensi layanan publik serta mendukung transformasi digital di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Saputra & Tukiman, 2024).

C. *Value e-government*

Elemen kunci dalam keberhasilan pengembangan *e-government* adalah nilai atau manfaat yang dihasilkan (Indrajit, 2016). Keberhasilan dalam pengembangan *e-governemnt*, termasuk inisiatif desa digital seperti yang diterapkan di Desa Kalikoa, sangat bergantung pada nilai dan manfaat yang dihasilkan dari sistem tersebut. *E-government* secara umum memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan

publik dengan cara yang lebih efisien dan transparan, baik untuk pemerintah maupun masyarakat (Kossasy, et al., 2024). Dalam konteks pengembangan desa digital di Desa Kalikoa, elemen ini menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasinya. Kebermanfaatan dari desa digital ini dapat diukur dari dua sisi, yaitu bagi Pemerintah Desa Kalikoa dan masyarakat desa itu sendiri. Bagi Pemerintah Desa, desa digital memberikan kemudahan dalam menyebarkan informasi serta berita kepada warga, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Tentu saja, efektivitas layanan ini juga bergantung pada kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah, di mana standar tinggi dalam hal kecepatan dan transparansi harus terus dijaga (Wismansyah, 2023).

Digitalisasi juga memberikan dampak positif bagi aparat desa dengan meningkatkan efisiensi kerja dan mendukung peningkatan kinerja pegawai. Bagi masyarakat sebagai penerima layanan, digitalisasi desa membawa manfaat berupa kemudahan dalam mengakses informasi desa melalui website dan media sosial resmi desa. Selain itu, layanan mandiri yang tersedia di website desa memungkinkan warga untuk mengurus berbagai keperluan administratif, seperti pembuatan surat menyurat, tanpa harus datang langsung ke balai desa. Hal ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat. Namun, tantangan tetap ada; misalnya, tidak semua warga mungkin memiliki pemahaman yang cukup tentang cara menggunakan layanan mandiri tersebut dengan optimal, yang menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat (Alkraihi & Ameen, 2022).

Secara keseluruhan, pengembangan desa digital di Desa Kalikoa menggambarkan bagaimana *e-government* tidak hanya sekadar pergeseran teknis, tetapi juga perlu dipandang sebagai proses bertahap dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas layanan melalui kemitraan erat antara pemerintah dan warga. Jika tantangan penggunaan teknologi dapat diatasi, potensi untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat

akan semakin besar, selaras dengan tujuan utama dari *e-governemnt*.

KESIMPULAN

Pengembangan desa digital di Desa Kalikoa berhasil berkat kombinasi faktor-faktor kunci, seperti dukungan kebijakan yang kuat, sosialisasi yang efektif, kapasitas sumber daya yang memadai, dan pemanfaatan infrastruktur digital yang optimal. Pemerintah desa berperan penting dalam menciptakan visi dan misi yang jelas terkait implementasi *e-governemnt*. Selain itu, keberadaan regulasi yang mendukung, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan layanan digital. Infrastruktur digital yang memadai dan pelatihan literasi digital bagi masyarakat juga berkontribusi besar terhadap keberhasilan transformasi ini, meskipun pendanaan terbatas pada anggaran desa.

Meskipun ada kemajuan yang signifikan, keberlanjutan pengembangan desa digital memerlukan kerjasama lintas sektor serta peningkatan kapasitas sumber daya yang lebih baik. Jika elemen-elemen kunci ini tidak dijaga, tantangan dalam implementasi *e-government* di desa dapat meningkat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan dan durasi. Data yang digunakan terbatas pada Desa Kalikoa dan tidak mencakup desa-desa lain yang mungkin memiliki konteks yang berbeda. Selain itu, penelitian ini hanya mengandalkan sumber data primer berupa wawancara dan observasi yang dapat dipengaruhi oleh subjektivitas responden.

Peneliti berikutnya diharapkan untuk memperluas cakupan penelitian ke desa-desa lain yang mengimplementasikan program serupa, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan implementasi *e-government* di berbagai konteks. Penelitian lebih lanjut juga dapat mencakup evaluasi jangka panjang untuk menilai dampak dari desa digital terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agastha, S., & Fikri, R. (2024). Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Digital Desa (Digides) Di Kantor Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 400–408. <https://doi.org/10.25299/jmp..18259>
- Aji Saputra, R., & Tukiman, T. (2024). Analysis of the Implementation of Digital Village in Socorejo Village, Tuban District. *Jurnal Impresi Indonesia*, 3(4), 316–322. <https://doi.org/10.58344/jii.v3i4.4821>
- Alkraihi, A., & Ameen, N. (2022). The impact of service quality, trust and satisfaction on young citizen loyalty towards government e-services. *Information Technology & People*, 35(4), 1239–1270. <https://doi.org/10.1108/ITP-04-2020-0229>
- Babys, S. A. M., Prayitno, E., Prodi, D., Komunikasi, I., & Benu, E. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Desa Digital Di Indonesia (Vol. 6, Issue 1).
- Badan, B., Dan, P., Provinsi, P., Jl, R., Diponegoro, N., & 24a, P. (2022). Pendekatan Pengembangan Sumber Daya Pegawai Aparatur Sipil Negara Development Approach Of State Civil Apparatus Resources.
- Creswell, J. W., & David Creswell, J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Guillamón, M.-D., Ríos, A.-M., Gesuele, B., & Metallo, C. (2016). Factors influencing social media use in local governments: The case of Italy and Spain. *Government Information Quarterly*, 33(3), 460–471. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.06.005>
- Hartini, H. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Hidayat Djabbari, M., Cahyo Nugroho, T., Amiruddin, I., & Yanto, E. (2024). Implementasi E-government dalam Pelayanan Publik Berbasis Website di Desa Tondowolio Kabupaten Kolaka. 10(2). <https://doi.org/10.26618/kjap.v10i2.15588>

- Irwansyah. (2021). Digital Village: Service, Togetherness, and SDGs. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 940(1), 012058. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/940/1/012058>
- Kareth, V., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2021). Village financial management: Case study in “Kampung Srer.” Indonesia Accounting Journal, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32400/iaj.32158>
- Kempeneer, S., Pirannejad, A., & Wolswinkel, J. (2023). Open government data from a legal perspective: An AI-driven systematic literature review. Government Information Quarterly, 40(3), 101823. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101823>
- Kossasy, S. O., Putri, S. W., Yasmearidi, F., Jufri, Y., & Suryany, E. (2024). E-government Implementation: The Use of e-kelurahan Improving Public Service (pp. 22–27). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-106-7_4
- Kusumawardani, A., Suyatno, M. I. Y., MS, D. A., Salim, N., & Rama, E. (2024). Digitalization, Self-Esteem, And Self-Efficacy In Accountability Village Fund Management. International Conference of Business and Social Sciences, 1390–1402. <https://doi.org/10.24034/icobuss.v4i1.621>
- Laili, S. N., & Kriswibowo, A. (2022). Elemen Sukses Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Jurnal Kebijakan Publik, 13(3), 295. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8031>
- Mardinata, E., Cahyono, T. D., & Muhammad Rizqi, R. (2023). Transformasi Digital Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat. Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 73–81. <https://doi.org/10.38043/parta.v4i1.4402>
- Margariti, V., Stamati, T., Anagnostopoulos, D., Nikolaidou, M., & Papastilianou, A. (2022). A holistic model for assessing organizational interoperability in public administration. Government Information Quarterly, 39(3), 101712. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101712>
- Purwanti, D., Nurdini, P. N., & Suherman, A. (2024). Revealing Optimal Financial Efficiency And Effectiveness In Indonesian Village Governance. Journal of Economic and Economic Policy, 1(3), 40–48. <https://doi.org/10.61796/ijecep.v1i3.32>
- Rachmawati, M., Dewantoro, B., Susilo, G., Pranaditya, A., & Sukardi, S. (2022). Analysis of the Effect of the Quality of Human Resources and Financial Management Information Systems on Village Financial Performance during the Covid 19 Pandemic. Proceedings of the First Multidiscipline International Conference, MIC 2021, October 30 2021, Jakarta, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2021.2315789>
- Rasaili, W. (2022). Operator Competence and Management of the Village Financial System: A Study on the Use of Siskeudes in Sumenep District. Neo Journal of Economy and Social Humanities, 1(2), 110–118. <https://doi.org/10.56403/nejesh.v1i2.10>
- Richardus Eko Indrajit. (2016). Konsep dan Strategi Eletronic Government.
- Rohiani, A. (2021). Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan. Journal of Regional and Rural Development Planning, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.1.15-27>
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi, 1(1), 18–33.
- Sartik, I., & Reinhard Pusung, C. (2024). Percepatan Pembangunan Desa Melalui Transformasi Digital Menuju Desa Cerdas; Analisis Bibliometrik. 12(2).

- Sudirman, F. A., & Saidin, S. (2022). Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-governemnt) dan Pembangunan Berkelanjutan: Reviu Literatur Sistematis. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 44–58. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.269>
- Wagola, R., Nurmandi, A., Misran, & Subekti, D. (2023). Government Digital Transformation in Indonesia. In C. Stephanidis, M. Antona, S. Ntoa, & G. Salvendy (Eds.), *HCI International 2023 Posters* (pp. 286–296). Springer Nature Switzerland.
- Wismansyah, A. R. (2023). Assessing the Success of the E-governmentSystem in Terms of the Quality of Public Services: A Case Study in the Regional Government of the City of Tangerang (pp. 367–374). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-146-3_37